

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien, maka dibutuhkan kinerja prima dari penyelenggara pelayanan publik. Organisasi sektor publik merupakan penyedia barang publik (*public goods*). Barang publik adalah barang yang memiliki dua karakteristik. Pertama, barang publik adalah komoditas yang keberadaannya tidak melalui persaingan antar-penyedia (*non-rivalry*), sebagaimana barang privat diperjualbelikan di pasar yang penuh persaingan antar produsennya. Kedua tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian bagi penggunaanya (*non-excludability*) sehingga masyarakat dapat menggunakannya (Nordriawan dan Hertianti, 2010). Salah satu jenis organisasi sektor publik adalah pemerintah. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik pun tidak luput dari tuduhan tersebut. Buruknya kinerja pemerintah di Indonesia menimbulkan banyak kritik dari masyarakat. Banyak faktor mengapa pemerintahan di Indonesia memiliki kinerja yang buruk, salah satunya adalah kurangnya sikap transparan dari penyelenggara pemerintahan. Pada hakekatnya organisasi sektor publik pemerintah merupakan roda pemerintahan yang berasal dari masyarakat. Masyarakat sudah memberikan kepercayaan kepada penyelenggara pemerintahan, oleh sebab itu harus diimbangi dengan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintahan yang baik harus menunjukkan sikap transparan, dengan kata lain harus membuka pintu yang seluas-luasnya kepada masyarakat agar ikut berperan serta atau berpartisipasi aktif dalam jalannya sebuah negara. Dengan

sikap transparan masyarakat dapat mengetahui apakah berbagai program telah tercapai dan apakah program-program sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomi, dengan cara efisien dan dengan hasil yang efektif, atau dikenal dengan istilah *spend well, spend less, spend wisely*.

Selain transparan, pemerintah juga harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahannya. Dalam akuntansi dikenal dengan istilah akuntabilitas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2004). Akuntabilitas ini merupakan dasar dari pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah memegang peran penting karena dengan pelaporan keuangan, pemerintah dapat memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam suatu negara yang demokratis.

Dalam negara demokratis masyarakat selalu menuntut adanya pelaporan keuangan yang transparan. Begitu juga sebaliknya, sebagai pemerintah di negara demokratis juga harus memberikan pertanggungjawabannya terhadap laporan keuangan secara transparan. Pemerintah demokratis harus dapat bertanggungjawab terhadap integritas, kinerja, dan kepengurusan sehingga pemerintah harus menyediakan informasi yang berguna untuk menaksir akuntabilitas serta membantu dalam hal pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Adanya tuntutan yang besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi organisasi sektor publik untuk memberikan

informasi kepada publik, salah satunya melalui informasi akuntansi berupa laporan keuangan.

Seiring dengan banyaknya keinginan dan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik pemerintah untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya maka diperlukan audit. Akan tetapi, keinginan dan tuntutan masyarakat belum sepenuhnya terwujud apabila hanya mengandalkan audit atas laporan keuangan yang memuat neraca, arus kas, dan perbandingan anggaran dan realisasi saja karena tidak semua masyarakat dapat menganalisis hasil audit tersebut. Disini masyarakat lebih menginginkan sesuatu yang bisa memberikan dampak yang nyata, yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat ingin mengetahui apakah semua program- program yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan dana masyarakat sudah memberikan hasil yang lebih, yaitu yang bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Maka dari itu, diperlukan perluasan audit yang bukan hanya mengaudit laporan keuangan dan kepatuhan saja, akan tetapi diperluas menuju audit kinerja. Maka dari itu penulis tertarik mengetahui bagaimana dampak audit kinerja terhadap instansi pemerintah tersebut. Oleh karena itu penulis memilih judul **“DAMPAK AUDIT KINERJA BAGI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG (DISBUDPAR)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan berkaitan dengan manfaat audit kinerja, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

“Bagaimanakah dampak Audit Kinerja yang dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang (DISBUDPAR) terhadap Pegawai (ASN) dan apakah sudah berjalan dengan baik dan benar ?”

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengidentifikasi masalah dan alternatif penyelesaian kepada manajemen untuk melihat permasalahan secara lebih detail dari sisi operasional.
2. Mengidentifikasi sebab-sebab aktual dari suatu masalah yang dapat dihadapi oleh kebijaksanaan manajemen atau tindakan lainnya.
3. Mengidentifikasi peluang dan kemungkinan untuk mengatasi keborosan dan ketidakefisienan, dalam memutuskan pertimbangan biaya harus dilakukan dengan tepat dan harus mempertimbangkan dampak bagi kegiatan operasional.
4. Mengidentifikasi kriteria untuk menilai pencapaian tujuan organisasi.
5. Melakukan evaluasi atas sistem pengendalian harus dapat menentukan apakah mekanisme telah menyediakan informasi tentang keefetivan operasional.
6. Menyediakan jalur komunikasi antara tataran operasional dan manajemen.
7. Melaporkan ketidakberesan atau melaporkan penyimpangan yang terjadi.

1.4 Manfaat Magang

1. Mempelajari atau mengikuti proses pemasaran maupun kemitraan kerja dengan pihak dari dalam maupun luar negeri guna memperdalam kemampuan negosiasi. Proses negosiasi dengan pihak asing diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bahasa asing dan *public speaking*.
2. Dengan kegiatan magang selama kurang lebih dua bulan di Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata, diharapkan secara otomatis akan memperbaiki sikap, mental dan meningkatkan kedisiplinan dengan selalu hadir pada jam dimana harus hadir dan izin jika harus meninggalkan kantor untuk keperluan kampus atau laporan magang.

3. Membantu Dinas Pariwisata dalam mempromosikan institusi itu sendiri beserta program-programnya kepada masyarakat secara umum dan kepada para wisatawan khususnya melalui promosi langsung ke masyarakat dan internet maupun media lain.
4. Sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi penulis tentang teori-teori yang berhubungan dengan mekanisme penentuan prioritas dan perencanaan audit.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematis penulisan Laporan Magang ini dibagi atas lima bab yang masing-masing bab saling berhubungan satu sama lainnya.

Sistematika penulisan Laporan Magang ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang :

Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Magang, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tentang landasan teori yang terdiri dari :

pengertian audit kinerja secara umum, pembagian audit kinerja, pengertian audit kinerja sektor publik, pengertian audit ekonomi dan efisiensi, audit efektivitas, manfaat audit kinerja, peningkatan akuntabilitas publik, peningkatan kinerja, dasar hukum, pengertian

prosedur, metode pengauditan, kriteria penilaian kinerja, pengukuran kinerja

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini menggambarkan tentang:

Gambaran umum Kota Padang, gambaran umum dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang (DISBUDPAR) , visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang (DISBUDPAR), tugas Pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang (DISBUDPAR), struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang (DISBUDPAR).

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan:

tentang hasil yang telah penulis dapatkan saat mengikuti kegiatan magang yang berkenaan dengan dengan judul penulis yaitu manfaat dari audit kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang (DISBUDPAR).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan:

kesimpulan dari laporan yang terkait dengan tujuan pembuatan laporan dan saran yang dapat diberikan sehingga memberikan pemasukan bagi instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang.